EVALUASI KEBIJAKAN JALUR PENDAFTARAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SMP DI KOTA LUBUKLINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Annisa Shabrina Mawarnie
NPP. 32.0208
Asdaf Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: annisashabrinam@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Selvia Junita Praja, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The zoning policy in the New Student Admission (PPDB) system is intended to promote equitable access to education. However, in Lubuklinggau City, this policy has not yielded optimal results. Data shows a decline in student enrollment at public junior high schools (SMP) alongside an increase in private school enrollment, as well as disparities in school distribution and education quality across districts. These conditions raise critical questions about the effectiveness and fairness of the zoning policy in achieving its goal of equalizing educational opportunities.* ***Purpose:*** *This study aims to evaluate the implementation of the Junior High School (SMP) zoning pathway PPDB policy in Lubuklinggau City, South Sumatra Province.* ***Method****: The research employed a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. A total of 15 informants were selected purposively based on the relevance of their roles in the implementation of the zoning policy. Data analysis was conducted using William N. Dunn's (2003) policy evaluation theory, which comprises six dimensions: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness, and was supported by the use of NVivo 12 software.* ***Result:*** *The results of the study indicate that the implementation of the zoning policy in Lubuklinggau City is not optimal. The dimensions of effectiveness and efficiency have not been fully achieved because there is still a mismatch between the objectives of the policy and the results of its implementation, as well as the use of resources that has not been maximized. In the dimensions of adequacy and equality, there is still inequality in access to quality education between regions. However, the responsiveness of local governments is relatively good in responding to dynamics in the field. However, the dimension of accuracy still faces challenges in adjusting policies to local socio-cultural conditions.* ***Conclusion:*** *Thus, it can be concluded that the implementation of the PPDB zoning policy in Lubuklinggau City requires improvements in various aspects so that the main goal of equalizing education can be achieved effectively and fairly.*

Keywords: *Policy Evaluation, PPDB, Junior High School, and Zoning*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diterapkan untuk mendorong pemerataan akses pendidikan. Namun, di Kota Lubuklinggau, kebijakan ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Data menunjukkan penurunan jumlah peserta didik di SMP negeri dan peningkatan di SMP swasta, serta adanya ketimpangan distribusi sekolah dan kualitas pendidikan antarwilayah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan keadilan kebijakan zonasi dalam mencapai tujuan pemerataan pendidikan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan PPDB jalur zonasi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota

Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan. **Metode:** Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini melibatkan 15 informan yang dipilih secara purposive berdasarkan relevansi peran mereka dalam implementasi kebijakan zonasi. Analisis data dilakukan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003) yang meliputi enam dimensi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan, serta didukung oleh bantuan perangkat lunak NVivo 12. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zonasi di Kota Lubuklinggau belum optimal. Dimensi efektivitas dan efisiensi belum tercapai sepenuhnya karena masih ditemukan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan hasil implementasinya, serta penggunaan sumber daya yang belum maksimal. Dalam dimensi kecukupan dan kesetaraan, masih terdapat ketimpangan akses terhadap pendidikan bermutu antar wilayah. Meskipun demikian, responsivitas pemerintah daerah tergolong baik dalam menanggapi dinamika di lapangan. Namun, dimensi ketepatan masih menghadapi tantangan dalam penyesuaian kebijakan dengan kondisi sosial budaya setempat. **Kesimpulan:** Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan PPDB jalur zonasi di Kota Lubuklinggau memerlukan perbaikan dalam berbagai aspek agar tujuan utama pemerataan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, PPDB, SMP, dan Zonasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyebutkan bahwa salah satu tujuan berdirinya negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah merancang berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Kebijakan publik tidak hanya sebagai solusi teknis atas masalah, tetapi juga hasil proses politik dan partisipatif yang kompleks (Hamdi, 2014). Salah satu upaya tersebut adalah melalui kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Sistem ini diterapkan untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh pendidikan yang setara, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, ataupun akademik.

Kebijakan zonasi dirancang dengan prinsip keadilan spasial, yaitu penerimaan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal ke sekolah, bukan semata-mata nilai akademik. Hal ini dimaksudkan untuk menghapuskan diskriminasi, mengurangi ketimpangan akses pendidikan, serta mendorong pemerataan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, sebagaimana yang terjadi di Australia, pendekatan zonasi yang terlalu dipengaruhi oleh pasar justru dapat memperkuat ketimpangan akses terhadap kurikulum akademik (Perry & Southwell, 2014). Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama di tingkat daerah. Salah satu contohnya terjadi di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Lubuklinggau telah menerapkan sistem zonasi dalam proses PPDB tingkat SMP. Namun, data dari Dinas Pendidikan menunjukkan adanya penurunan jumlah siswa di SMP negeri, dari 9.253 pada tahun 2022 menjadi 9.031 siswa pada tahun 2023. Sebaliknya, jumlah siswa di SMP swasta justru meningkat dari 3.055 menjadi 3.240 pada periode yang sama. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas kebijakan zonasi, khususnya dalam mendorong pemerataan pendidikan dan

mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri. Fenomena ini memperlihatkan bahwa segregasi ekonomi antar wilayah bisa berdampak langsung pada ketimpangan hasil pendidikan, sebagaimana ditemukan oleh Owens (2017) dalam konteks distrik sekolah di Amerika.

Selain itu, terdapat ketimpangan jumlah sekolah dan kualitas akreditasi antar kecamatan. Sebagian wilayah memiliki jumlah sekolah swasta yang lebih banyak dibanding negeri, bahkan ada kecamatan yang hanya memiliki satu SMP negeri tanpa adanya sekolah swasta. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa distribusi lembaga pendidikan belum merata, dan kebijakan zonasi belum sepenuhnya menjawab tantangan geografis dan sosial di tingkat lokal.

Berbagai tantangan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan zonasi memiliki tujuan mulia, implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan teknis. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan PPDB jalur zonasi di Kota Lubuklinggau. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah mencapai tujuan pemerataan pendidikan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki agar kebijakan dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian ini mengangkat permasalahan utama berupa bagaimana evaluasi kebijakan jalur pendaftaran zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh implementasi kebijakan zonasi yang belum menunjukkan hasil optimal dalam konteks lokal, baik dari segi pemerataan akses pendidikan maupun kualitas layanan yang diterima oleh peserta didik. Meskipun kebijakan zonasi dirancang untuk mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat dan mengurangi disparitas antarwilayah, realitas di lapangan justru memperlihatkan adanya ketimpangan dan tantangan yang belum terselesaikan.

Sejumlah studi terdahulu telah membahas kebijakan zonasi dalam PPDB, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Sabrina (2019), Junaedy, dkk. (2021), dan Safitri & Yusran (2021). Namun, fokus penelitian tersebut lebih banyak diarahkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau pada unit sekolah tertentu, serta belum mencakup wilayah Kota Lubuklinggau secara keseluruhan. Kebijakan publik dalam sektor pendidikan perlu disesuaikan dengan konteks sosial dan geografis daerah pelaksanaannya (Dewi, 2022). Selain itu, penelitian-penelitian tersebut umumnya belum mengkaji implementasi kebijakan zonasi dengan pendekatan evaluatif yang komprehensif, khususnya berdasarkan enam dimensi evaluasi menurut William N. Dunn (2003), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan. Dalam pengembangan sistem penerimaan berbasis zonasi, analisis spasial dan keadilan sosial perlu dipertimbangkan agar kebijakan tidak bias terhadap kelompok rentan (Prieto *et al*., 2023).

Kondisi di Kota Lubuklinggau menunjukkan adanya indikasi kegagalan dalam pencapaian tujuan kebijakan zonasi, yang tercermin dari data penurunan jumlah peserta didik di sekolah negeri dan peningkatan signifikan pada sekolah swasta, serta distribusi sekolah dan akreditasi yang tidak merata antar kecamatan. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas kebijakan zonasi dalam mendorong pemerataan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan akademik tersebut, dengan menawarkan kajian evaluatif berbasis konteks lokal serta penggunaan pendekatan teoretis yang holistik guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran dan berkeadilan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah menjadi perhatian dalam kajian kebijakan publik, khususnya di sektor pendidikan. Beberapa studi terdahulu yang relevan dengan topik ini telah dilakukan dengan pendekatan, lokus, dan temuan yang beragam.

Pertama, penelitian oleh Sabrina (2019) berjudul "Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menunjukkan bahwa peran Dinas Pendidikan dalam mengawal pelaksanaan zonasi masih belum maksimal, terutama karena kurangnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat.

Kedua, penelitian oleh Junaedy dkk. (2021) berjudul "Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 1 Abiansemal". Studi ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003) dan menemukan bahwa implementasi zonasi belum efisien dan efektif dalam mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan.

Ketiga, Safitri & Yusran (2021) dalam penelitiannya "Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam PPDB pada SMA Negeri di Kota Padang" mengungkapkan bahwa pelaksanaan sistem zonasi masih mengalami hambatan pada aspek keadilan, akuntabilitas, dan transparansi, yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap kebijakan.

Keempat, Hasbullah (2019) melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam PPDB di SMPN Kabupaten Pamekasan". Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan zonasi masih menemui kendala berupa belum adanya petunjuk teknis yang jelas dan lemahnya pengawasan, sehingga menimbulkan praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan PPDB.

Kelima, Ambarwati (2022) dalam artikelnya berjudul "Evaluasi Implementasi Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 1 Kapas Kabupaten Bojonegoro", meneliti pelaksanaan kebijakan zonasi di tingkat SMP dengan menggunakan pendekatan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem zonasi di sekolah tersebut belum berjalan secara optimal karena terbatasnya sosialisasi kebijakan, kurangnya kesiapan infrastruktur sekolah, dan masih minimnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan.

Kelima penelitian tersebut memperlihatkan bahwa meskipun sistem zonasi diharapkan dapat mendorong pemerataan akses pendidikan, pada praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan implementatif di lapangan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian khusus pada konteks Kota Lubuklinggau, sekaligus menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan secara komprehensif berdasarkan dimensi-dimensi yang ditawarkan oleh William N. Dunn (2003).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah (*novelty*) dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau hanya fokus pada satuan pendidikan tertentu, serta terbatas pada dimensi administratif seperti sosialisasi, teknis pelaksanaan, atau persepsi masyarakat secara umum. Berbeda dengan itu, penelitian ini tidak hanya memfokuskan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Lubuklinggau, tetapi juga menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003) sebagai kerangka analisis utama. Teori ini mencakup enam dimensi evaluatif: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan, yang memungkinkan evaluasi kebijakan dilakukan secara lebih komprehensif dan terstruktur dalam konteks lokal.

Berbeda dari itu, penelitian ini secara khusus mengevaluasi kebijakan PPDB jalur zonasi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Lubuklinggau dengan pendekatan evaluasi kebijakan yang bersifat menyeluruh. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn (2003) sebagai kerangka analisis utama, yang meliputi enam dimensi evaluatif: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan. Pendekatan ini belum secara luas diterapkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya pada konteks serupa.

Selain itu, penelitian ini memperkuat kontribusi ilmiahnya melalui pemanfaatan data lapangan secara kontekstual yang menampilkan fakta-fakta aktual seperti tren penurunan jumlah peserta didik di SMP negeri, peningkatan jumlah siswa di SMP swasta, serta ketimpangan distribusi sekolah dan akreditasi di berbagai kecamatan di Kota Lubuklinggau. Fakta-fakta tersebut memberikan sudut pandang baru yang bersifat lokal, aktual, dan aplikatif dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan zonasi.

Dengan demikian, kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada lokus yang belum banyak dikaji, pendekatan evaluatif yang komprehensif, serta penyajian bukti-bukti empiris berbasis konteks lokal yang memperkaya diskursus mengenai efektivitas implementasi kebijakan zonasi di tingkat daerah.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan jalur zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan jalur pendaftaran zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan memahami fenomena kebijakan secara kontekstual, naturalistik, dan menyeluruh berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna subjektif yang mendalam atas kebijakan publik (Nurdin & Hartati, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Metode kualitatif mendalam seperti ini diperlukan untuk memahami perilaku, persepsi, dan motivasi subjek secara alami (Sugiyono, 2019). Penelitian dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 25 Januari 2025 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau serta beberapa SMP negeri yang menjadi lokasi implementasi kebijakan zonasi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive* dengan mempertimbangkan posisi dan peran strategis mereka dalam kebijakan yang dikaji. Sebanyak 15 informan (narasumber) terlibat dalam penelitian ini. Informan kunci terdiri dari Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau, Kepala Sekolah SMP Negeri, serta perwakilan orang tua atau masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan zonasi. Pemilihan informan ini didasarkan pada asumsi bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan otoritas yang relevan dalam menjelaskan dinamika kebijakan zonasi secara empiris.

Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan kerangka teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn (2003) yang mencakup enam dimensi utama: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian kebijakan di pemerintahan daerah menuntut metode yang mampu menjawab dinamika sosial dan kelembagaan secara utuh (Simangunsong, 2019). Seluruh data dianalisis secara tematik dengan bantuan perangkat lunak *NVivo 12* untuk mengelola, mengklasifikasi, dan menginterpretasi informasi secara sistematis

berdasarkan kategori evaluatif yang telah ditentukan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyusun evaluasi yang menyeluruh dan kontekstual terhadap kebijakan zonasi PPDB di Kota Lubuklinggau.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengacu pada teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003) yang mencakup enam dimensi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai pelaksanaan kebijakan zonasi dalam PPDB tingkat SMP di Kota Lubuklinggau. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan masyarakat, serta dokumentasi kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal karena masih terdapat kesenjangan daya tampung, distribusi sekolah yang tidak merata, dan tantangan dalam mencapai pemerataan akses pendidikan.

3.1. Evaluasi Kebijakan Jalur Pendaftaran Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Lubuklinggau

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan PPDB jalur zonasi tingkat SMP di Kota Lubuklinggau dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003) yang mencakup enam dimensi evaluatif: efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan. Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *NVivo 12*, yang memudahkan peneliti dalam mengelola data wawancara, dokumentasi, dan dokumen kebijakan melalui fitur pengkodean (*nodes*), visualisasi frekuensi kata, dan pemetaan hubungan antar data (*project map*). Hasil analisis menunjukkan bahwa kata "sekolah" dan "zonasi" paling dominan dalam data lapangan, menandakan fokus utama informan terhadap aspek akses dan kebijakan zonasi. Visualisasi *word tree* dan *project map* menunjukkan bahwa sistem zonasi memiliki dampak ganda: di satu sisi mendorong pemerataan pendidikan, namun di sisi lain menimbulkan tantangan terkait kualitas layanan, distribusi guru, dan infrastruktur pendidikan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan zonasi di Kota Lubuklinggau belum sepenuhnya mencapai tujuannya dan memerlukan evaluasi mendalam pada setiap dimensi kebijakan.

a. Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu dimensi utama dalam evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003), yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan kebijakan dapat dicapai. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas kebijakan PPDB jalur zonasi tingkat SMP di Kota Lubuklinggau dianalisis berdasarkan tiga indikator utama, yaitu pencapaian tujuan, keberhasilan program, dan dampak kebijakan. Ketiga indikator tersebut dianalisis melalui data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dikelola menggunakan perangkat lunak *Nvivo 12*.

Pada indikator “pencapaian tujuan”, hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa capaian seperti peningkatan keselamatan siswa karena jarak sekolah yang lebih dekat dan pengurangan beban transportasi, tantangan masih mendominasi. Pemerataan siswa dan kualitas sekolah belum sepenuhnya tercapai. Data menunjukkan bahwa beberapa sekolah unggulan tetap mengalami kelebihan pendaftar, sementara sekolah lain kekurangan siswa. Selain itu, kualitas sekolah antar zona masih timpang, ditandai dengan adanya sekolah yang terakreditasi B dan C di zona tertentu. Tantangan lain yang diidentifikasi meliputi keinginan orang tua menyekolahkan anak di luar zona, manipulasi alamat domisili, serta penurunan mutu akademik akibat ketimpangan kemampuan siswa dalam satu kelas.

Indikator “keberhasilan program” menunjukkan bahwa PPDB jalur zonasi berhasil meningkatkan aksesibilitas dan keselamatan siswa, serta menurunkan biaya transportasi.

Namun, pemerataan kualitas dan kesempatan belum sepenuhnya tercapai. Pemerataan siswa juga belum optimal karena masih terdapat sekolah dengan jumlah pendaftar jauh di bawah kuota. Ketimpangan kualitas antar sekolah dalam satu zona membuat beberapa siswa terpaksa bersekolah di sekolah yang dianggap kurang memadai. Manipulasi domisili juga masih terjadi sebagai bentuk ketidakpuasan orang tua terhadap zonasi.

Sementara itu, indikator "dampak kebijakan" memperlihatkan bahwa dampak negatif dari kebijakan PPDB zonasi lebih dominan dibandingkan dampak positif. Dampak negatif yang teridentifikasi meliputi ketidakmerataan kualitas sekolah, manipulasi dokumen domisili, penurunan kepuasan masyarakat, dan kesulitan pengajaran akibat heterogenitas kemampuan siswa. Dampak positif seperti pengurangan jarak ke sekolah, pengurangan beban transportasi, serta pendistribusian siswa ke sekolah kurang diminati memang ada, tetapi belum cukup kuat untuk menutupi dampak negatif yang lebih luas.

Berdasarkan ketiga indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan PPDB jalur zonasi di Kota Lubuklinggau masih belum optimal. Evaluasi kebijakan pendidikan penting untuk memastikan bahwa akses, mutu, dan pemerataan benar-benar terpenuhi di semua wilayah (Fattah, 2012). Meskipun terdapat beberapa keberhasilan, kebijakan ini masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai tujuan pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan menyeluruh, terutama dalam aspek pemerataan kualitas sekolah, validitas sistem zonasi, serta strategi sosialisasi dan pengawasan agar implementasi kebijakan ini benar-benar dapat berjalan secara adil dan efektif.

b. Efisiensi

Efisiensi merupakan dimensi penting dalam mengevaluasi kebijakan publik, karena menilai sejauh mana suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan upaya dan sumber daya yang optimal. Dalam penelitian ini, efisiensi kebijakan PPDB jalur zonasi tingkat SMP di Kota Lubuklinggau dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu penghematan waktu, penggunaan sumber daya, dan rasio biaya-manfaat. Ketiga indikator tersebut dievaluasi dengan mengacu pada data wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dianalisis menggunakan perangkat lunak *Nvivo 12*.

Pada indikator "penghematan waktu", hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan PPDB jalur zonasi belum efisien dari segi waktu. Informasi yang diperoleh dari para informan mengungkapkan bahwa tantangan dalam pemerataan kualitas, pemerataan siswa, serta perbaikan pembelajaran masih belum terselesaikan dalam jangka waktu yang telah cukup lama sejak kebijakan ini diterapkan. Ketidaktercapaian tujuan dalam lima tahun terakhir menandakan bahwa proses pelaksanaan kebijakan masih memerlukan waktu yang panjang dan belum menunjukkan efisiensi waktu dalam implementasinya.

Indikator "penggunaan sumber daya" juga menunjukkan efisiensi yang rendah. Meskipun terdapat berbagai upaya seperti pemerataan guru, peningkatan sarana dan prasarana, serta penggunaan teknologi, pelaksanaannya masih belum optimal. Kebutuhan terhadap sumber daya manusia untuk verifikasi data, keterbatasan anggaran, serta ketimpangan infrastruktur sekolah menjadi kendala utama. Distribusi tenaga pendidik dan siswa masih belum seimbang, dan sebagian sekolah masih belum mampu memenuhi kuota rombel, yang menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya belum dilakukan secara efisien dalam mendukung tujuan pemerataan pendidikan.

Pada indikator "rasio biaya-manfaat", terdapat temuan positif bahwa kebijakan zonasi memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bentuk pengurangan biaya transportasi dan penyewaan tempat tinggal. Di sisi lain, pemerintah juga memperoleh manfaat berupa efisiensi alokasi anggaran pendidikan untuk pemerataan kualitas. Namun

demikian, tantangan tetap ada, seperti perlunya investasi tambahan untuk sekolah di zona tertinggal, pembiayaan verifikasi data domisili, dan kebutuhan sosialisasi berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat keuntungan, rasio biaya terhadap manfaat belum sepenuhnya seimbang dan optimal.

Berdasarkan ketiga indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan PPDB jalur zonasi di Kota Lubuklinggau belum menunjukkan efisiensi yang memadai. Proses implementasi masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis, terutama dalam penggunaan waktu, pemanfaatan sumber daya, dan perimbangan antara biaya dan manfaat. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sistem perencanaan dan pengawasan, serta alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan efisiensi kebijakan secara keseluruhan.

c. Kecukupan

Kecukupan merupakan dimensi evaluasi kebijakan yang bertujuan menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar dan menyelesaikan masalah yang menjadi tujuan awal kebijakan. Dalam penelitian ini, dimensi kecukupan pada kebijakan PPDB jalur zonasi tingkat SMP di Kota Lubuklinggau dianalisis melalui dua indikator, yaitu kapasitas penanganan masalah dan pemenuhan kebutuhan dasar. Data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan bantuan perangkat lunak *Nvivo 12*.

Indikator "kapasitas penanganan masalah" menunjukkan bahwa kebijakan PPDB jalur zonasi belum sepenuhnya berhasil menyelesaikan permasalahan yang ada. Meskipun ditujukan untuk pemerataan kualitas pendidikan, pelaksanaannya justru memunculkan tantangan baru, seperti siswa berprestasi yang merasa kurang berkembang karena lingkungan belajar yang kurang mendukung, serta beban tambahan bagi guru dalam menyesuaikan metode pembelajaran terhadap kemampuan siswa yang semakin beragam. Ketimpangan kualitas tenaga pendidik, fasilitas, dan program pengajaran antar sekolah juga memperkuat kesimpulan bahwa kebijakan ini belum cukup kuat dalam menangani akar persoalan ketidakmerataan pendidikan di Kota Lubuklinggau.

Pada indikator "pemenuhan kebutuhan dasar", kebijakan zonasi juga belum menunjukkan hasil yang memadai. Berdasarkan wawancara dan data akreditasi sekolah, masih ditemukan sekolah dengan kualitas rendah, seperti SMP Negeri 15 yang hanya terakreditasi C, serta sekolah lain dengan akreditasi B di wilayah yang sama. Hal ini menunjukkan belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang layak dan setara di semua zona. Tantangan lain mencakup keterbatasan sumber daya pendukung serta belum meratanya kualitas layanan pendidikan yang diperoleh siswa, terutama di wilayah dengan fasilitas terbatas.

Berdasarkan kedua indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan PPDB jalur zonasi di Kota Lubuklinggau masih belum cukup dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menyelesaikan permasalahan ketimpangan pendidikan. Meskipun kebijakan ini memiliki arah tujuan yang baik, implementasinya masih menghadapi kendala serius dalam menciptakan kondisi pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas di seluruh wilayah kota.

d. Kesamaan

Dimensi Kesamaan atau kesetaraan merupakan dimensi penting dalam evaluasi kebijakan publik karena menilai apakah kebijakan memberikan dampak yang adil dan merata bagi semua kelompok sasaran, tanpa menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Dalam konteks PPDB jalur zonasi di Kota Lubuklinggau, kesamaan menjadi landasan utama karena kebijakan ini bertujuan menciptakan pemerataan kualitas pendidikan. Dimensi ini dianalisis melalui dua indikator utama, yaitu keadilan kebijakan

dan kesetaraan peluang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dianalisis melalui *Nvivo 12*.

Indikator "keadilan kebijakan" menunjukkan bahwa meskipun secara prinsip kebijakan zonasi bertujuan adil dan inklusif (dengan memberi akses yang sama kepada seluruh calon peserta didik tanpa melihat latar belakang sosial ekonomi) dalam praktiknya masih dihadapkan pada tantangan signifikan. Banyak orang tua merasa kebijakan ini merugikan anak-anak dengan prestasi akademik tinggi yang tidak bisa masuk sekolah unggulan karena terbatasnya kuota non-zonasi. Ketimpangan kualitas antar sekolah dalam zona yang berbeda turut memperbesar persepsi ketidakadilan. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan kebijakan dalam PPDB zonasi dinilai belum sepenuhnya terealisasi secara efektif.

Pada indikator "kesetaraan peluang", hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan zonasi belum mampu menciptakan peluang yang benar-benar setara. Pembatasan kuota dan perbedaan mutu antar sekolah menyebabkan siswa dengan potensi akademik tinggi harus bersekolah di institusi dengan kualitas yang kurang mendukung perkembangannya. Tabel distribusi kuota di tiga SMP favorit menunjukkan bahwa sebagian besar kursi telah teralokasi untuk jalur zonasi, sementara siswa berprestasi dari luar zona harus bersaing di jalur prestasi yang lebih terbatas. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan menimbulkan persepsi negatif bahwa kebijakan tersebut justru membatasi peluang, bukan memperluasnya.

Berdasarkan kedua indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimensi kesamaan dalam kebijakan PPDB jalur zonasi di Kota Lubuklinggau masih belum berjalan secara optimal. Meskipun prinsip keadilannya telah dirumuskan secara normatif, tantangan dalam implementasi serta ketimpangan kualitas sekolah telah menciptakan kesenjangan dalam kesetaraan peluang. Perbaikan dalam distribusi kualitas pendidikan dan evaluasi proporsi kuota perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan ini benar-benar mencerminkan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh peserta didik.

e. Responsivitas

Responsivitas merupakan dimensi evaluasi kebijakan yang menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat serta menyelesaikan persoalan yang ada. Dalam konteks PPDB jalur zonasi di Kota Lubuklinggau, responsivitas dianalisis melalui dua indikator, yaitu kesesuaian dengan kebutuhan publik dan aspirasi masyarakat. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan bantuan perangkat lunak *Nvivo 12*, berdasarkan hasil wawancara dan data dukung dari berbagai pemangku kepentingan.

Pada indikator "kesesuaian dengan kebutuhan publik", kebijakan PPDB zonasi dinilai masih menimbulkan kesenjangan, terutama dalam aspek kualitas sekolah, distribusi guru, dan sarana prasarana antar zona. Masyarakat menginginkan pendidikan yang merata dan berkualitas, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa siswa berprestasi seringkali tidak dapat memilih sekolah sesuai potensinya karena terbatasi sistem zonasi. Ketidakseimbangan distribusi tenaga pengajar di berbagai kecamatan juga memperkuat kesenjangan layanan pendidikan. Dengan demikian, kebijakan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan publik dalam menciptakan akses pendidikan yang adil dan merata.

Indikator "aspirasi masyarakat" menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, telah menyediakan ruang partisipasi publik seperti forum, musyawarah, media sosial, dan layanan pengaduan. Sosialisasi kebijakan PPDB juga dilaksanakan secara rutin kepada orang tua dan masyarakat sebelum pelaksanaan sistem zonasi. Meskipun partisipasi ini sudah terbuka, tantangan utama terletak pada tindak lanjut atas aspirasi masyarakat. Dukungan

institusional terhadap kepala sekolah dan pemangku kebijakan di tingkat daerah sangat menentukan keberhasilan kebijakan zonasi (Ford *et al*., 2020). Banyak masyarakat menilai bahwa masukan yang diberikan belum sepenuhnya diakomodasi dalam perbaikan kebijakan, serta masih diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan fleksibilitas sistem penerimaan peserta didik.

Berdasarkan kedua indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimensi responsivitas kebijakan PPDB jalur zonasi di Kota Lubuklinggau berada dalam kategori cukup baik. Pemerintah telah menunjukkan upaya dalam menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat, namun masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang diterapkan dengan kebutuhan riil publik. Hal ini mencerminkan pentingnya manajemen pemerintahan daerah yang responsif dalam menyusun dan menjalankan kebijakan publik secara adaptif (Hamid, 2018). Diperlukan langkah lanjutan untuk memastikan kebijakan ini benar-benar adaptif terhadap kondisi lokal dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan yang lebih berkeadilan.

f. Ketepatan

Ketepatan merupakan dimensi evaluasi kebijakan yang menilai apakah pelaksanaan suatu kebijakan sesuai dengan konteks sosial dan kebijakan lain yang telah berlaku sebelumnya. Dalam konteks PPDB jalur zonasi tingkat SMP di Kota Lubuklinggau, evaluasi dimensi ketepatan bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kebijakan dengan kondisi sosial budaya masyarakat serta sinkronisasinya dengan kebijakan lain yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan perangkat *Nvivo 12* berdasarkan data wawancara dari pemangku kebijakan dan masyarakat.

Pada indikator "kesesuaian dengan kebijakan lainnya", ditemukan bahwa implementasi PPDB jalur zonasi belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan afirmatif, perencanaan tata ruang, maupun program pengembangan tenaga pendidik. Meskipun kebijakan zonasi secara prinsip mendukung pemerataan pendidikan, tantangan muncul karena belum adanya sinkronisasi yang kuat dengan kebijakan pembangunan daerah dan perencanaan fasilitas pendidikan. Hal ini membuat pelaksanaan kebijakan zonasi sering berjalan secara sektoral, tanpa dukungan penuh dari kebijakan lain yang seharusnya mendukung sistem pendidikan secara menyeluruh.

Indikator "kesesuaian dengan kondisi sosial budaya" menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan PPDB zonasi belum sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik budaya lokal masyarakat Kota Lubuklinggau. Masyarakat masih memiliki persepsi kuat terhadap keberadaan sekolah unggulan, sehingga cenderung memaksakan anak untuk masuk ke sekolah favorit meskipun berada di luar zona. Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah pendaftar di beberapa SMP favorit seperti SMP 1, 2, dan 3. Di sisi lain, sekolah-sekolah di zona lain mengalami kekurangan peminat. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan zonasi dan pola pikir masyarakat yang masih menjunjung tinggi selektivitas dan prestise sekolah tertentu.

Berdasarkan kedua indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketepatan penerapan kebijakan PPDB jalur zonasi di Kota Lubuklinggau masih belum optimal. Kebijakan ini belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan lain yang seharusnya mendukung, serta masih menghadapi tantangan dalam menjawab realitas sosial budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, dibutuhkan penyesuaian kebijakan yang lebih adaptif dan terintegrasi agar dapat mencapai tujuan pemerataan pendidikan secara efektif dan tepat sasaran.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengevaluasi kebijakan PPDB jalur zonasi tingkat SMP di Kota Lubuklinggau menggunakan enam dimensi evaluasi dari William N. Dunn (2003). Temuan

utama menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran. Sama halnya dengan temuan Junaedy (2021) yang menyatakan bahwa implementasi zonasi di SMPN 1 Abiansemal belum efektif dalam mendukung pemerataan akses pendidikan, penelitian ini juga menemukan bahwa ketimpangan kualitas sekolah dan belum meratanya distribusi siswa menjadi hambatan utama pencapaian tujuan kebijakan. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Sabrina (2019) yang menyoroti kurangnya peran aktif Dinas Pendidikan dalam mengawal proses sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan zonasi.

Dalam aspek efisiensi dan kecukupan, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan sumber daya belum optimal, rasio biaya-manfaat belum ideal, dan penghematan waktu dalam pelaksanaan kebijakan masih rendah. Hal ini sejalan dengan temuan Ambarwati (2022) di Kabupaten Bojonegoro, yang menyebutkan bahwa belum efisiennya pelaksanaan PPDB zonasi disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarlembaga dan keterbatasan infrastruktur sekolah. Namun, penelitian ini menambahkan bahwa dukungan anggaran dan teknologi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pemerataan kualitas sekolah. Selain itu, berbeda dengan penelitian Safitri & Yusran (2021) di Kota Padang yang menekankan transparansi proses, penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan akreditasi sekolah turut menjadi indikator penting dalam dimensi kecukupan.

Dimensi kesamaan dan responsivitas dalam penelitian ini juga menunjukkan hasil yang serupa dengan beberapa penelitian terdahulu. Sebagaimana dikemukakan oleh Hasbullah (2019), adanya ketidakadilan akibat perbedaan kualitas sekolah dan praktik manipulasi domisili juga ditemukan dalam konteks Kota Lubuklinggau. Meskipun pemerintah daerah telah membuka ruang aspirasi melalui forum dan media sosial, seperti juga dicatat oleh Ambarwati (2022), penanganan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan korektif yang signifikan. Penelitian ini menekankan bahwa distribusi guru dan fasilitas masih menjadi sumber keluhan publik, yang menunjukkan lemahnya respons kebijakan terhadap kebutuhan lapangan.

Pada akhirnya, dimensi ketepatan menunjukkan bahwa kebijakan PPDB jalur zonasi belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Lubuklinggau. Berbeda dengan penelitian lainnya, penelitian ini menyoroti bahwa persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit menjadi hambatan kultural yang belum terselesaikan. Temuan ini memperkaya kajian sebelumnya dengan memasukkan unsur karakteristik sosial lokal sebagai salah satu determinan keberhasilan kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi ilmiah baru melalui analisis integratif antar dimensi kebijakan dan konteks sosial setempat.

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Salah satu temuan menarik dari penelitian ini adalah adanya tantangan sosial-budaya yang menghambat efektivitas kebijakan zonasi, terutama terkait persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit. Meskipun kebijakan PPDB jalur zonasi bertujuan untuk menciptakan pemerataan kualitas pendidikan, masyarakat masih cenderung menganggap sekolah-sekolah tertentu lebih unggul dibanding yang lain. Hal ini mendorong sebagian orang tua melakukan berbagai cara untuk memasukkan anaknya ke sekolah unggulan di luar zona, termasuk dengan manipulasi alamat domisili. Situasi ini menunjukkan bahwa resistensi budaya menjadi faktor penghambat signifikan yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan pendidikan berbasis wilayah.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan ketimpangan distribusi sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagai faktor yang memperlemah efisiensi dan kecukupan kebijakan. Beberapa sekolah di zona tertentu kekurangan guru dan fasilitas, sementara sekolah lain justru kelebihan pendaftar. Kondisi ini mengakibatkan proses pembelajaran tidak berjalan optimal,

terutama di sekolah yang kurang diminati. Ketidakseimbangan ini tidak hanya berdampak pada kualitas pendidikan, tetapi juga memperkuat ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan zonasi yang dianggap belum adil dan merata.

Di sisi lain, terdapat upaya positif dari pemerintah daerah yang menjadi faktor pendukung kebijakan, seperti penyediaan kanal aspirasi, sosialisasi rutin, serta pelaksanaan sistem PPDB secara daring. Penggunaan teknologi informasi dalam proses pendaftaran merupakan inovasi yang membantu transparansi dan efisiensi administrasi. Namun, keterbatasan literasi digital dan akses internet di sebagian wilayah menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, meskipun terdapat aspek pendukung yang patut diapresiasi, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan dan pendampingan agar tujuan zonasi dapat tercapai secara menyeluruh dan inklusif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Lubuklinggau belum sepenuhnya berjalan optimal. Evaluasi berdasarkan enam dimensi kebijakan menunjukkan bahwa pada dimensi efektivitas, kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pencapaian tujuan pemerataan kualitas dan akses pendidikan, dengan dampak negatif yang lebih dominan dibandingkan dampak positif. Dari sisi efisiensi, kebijakan ini belum efisien secara waktu, penggunaan sumber daya, maupun dalam rasio biaya-manfaat, karena masih ditemukan ketimpangan alokasi guru, infrastruktur, serta beban anggaran yang belum proporsional.

Dalam dimensi kecukupan, kebijakan ini belum mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan belum menyelesaikan permasalahan ketimpangan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Dimensi kesamaan juga menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini memiliki prinsip keadilan, dalam praktiknya masih menimbulkan persepsi ketidakadilan dan ketimpangan peluang bagi peserta didik. Sementara pada dimensi responsivitas, pemerintah dinilai cukup tanggap dalam menerima aspirasi masyarakat, tetapi belum sepenuhnya mampu menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan publik yang terus berkembang. Terakhir, dalam dimensi ketepatan, kebijakan zonasi belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan lain maupun kondisi sosial budaya masyarakat, mengingat masih tingginya preferensi terhadap sekolah favorit dan belum meratanya persepsi kualitas pendidikan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan PPDB jalur zonasi di Kota Lubuklinggau memerlukan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun integrasi dengan kebijakan pendidikan lainnya, agar tujuan pemerataan akses dan kualitas pendidikan dapat tercapai secara adil, merata, dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini terbatas pada evaluasi kinerja KSM di Kabupaten Banyumas dengan lima dimensi utama, yakni kuantitas, kualitas, kerja sama, tanggung jawab, dan inisiatif. Ruang lingkupnya belum mencakup wilayah lain yang memiliki karakteristik kelembagaan berbeda. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dalam periode terbatas (6–25 Januari 2025) dan bergantung pada metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga belum merepresentasikan dinamika jangka panjang. Variasi kondisi antar-KSM juga menjadi kendala dalam menarik generalisasi yang lebih luas.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah kajian dan mengintegrasikan pendekatan kuantitatif guna memperkuat analisis hubungan antara variabel. Fokus baru juga dapat diarahkan pada efektivitas kolaborasi multipihak dan penerapan kewirausahaan sosial dalam pengelolaan sampah. Dengan pendekatan yang lebih

komprehensif, penelitian ke depan diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan sistem ekonomi sirkular yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau atas dukungan, izin, dan kerja sama yang telah diberikan selama proses pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga mengapresiasi seluruh informan, baik dari pihak aparatur dinas, panitia PPDB, kepala sekolah, tenaga pendidik, maupun masyarakat, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi, pandangan, dan data yang relevan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam perbaikan implementasi kebijakan PPDB jalur zonasi serta mendorong pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang lebih baik di Kota Lubuklinggau.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ambarwati, R. (2022). Evaluasi Implementasi Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 1 Kapas Kabupaten Bojonegoro. *MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik)*, *5*(4), 384-390. https://doi.org/10.37504/map.v5i4.472

Dewi, D. S. K. (2022). *Kebijakan publik*. Jakarta: UM Jakarta Press.

Fattah, N. (2012). *Analisis kebijakan pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ford, T. G., Lavigne, A. L., Fiegener, A. M., & Si, S. (2020). Understanding District Support for Leader Development and Success in the Accountability Era: A Review of the Literature Using Social-Cognitive Theories of Motivation. *Review of Educational Research, 90*(2), 264–307. https://doi.org/10.3102/0034654319899f727

Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Sumedang: IPDN.

Hasbullah. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, *9*(2), 112. https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1413

Junaedy, I. K. D., Mardika, I. M., & Yudhiantara, I. M. (2021). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abiansemal. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, *6*(2), 107–115. https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.107-115

Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Modul Perkuliahan Metodologi Penelitian Sosial*. Sumedang: Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.

Owens, A. (2017). Income Segregation Between School Districts and Inequality in Students' Achievement. *Sociology of Education, 91*(1), 1–27. https://doi.org/10.1177/0038040717741180

Perry, L. B., & Southwell, L. (2014). Access to Academic Curriculum in Australian Secondary Schools: A Case Study of a Highly Marketised Education System. *Journal of Education Policy, 29*(4), 467–485. https://doi.org/10.1080/02680939.2013.846414

Prieto, L. M., Aguero-Valverde, J., Flacke, J., & van Maarseveen, M. (2023). Evaluating School Priorities for Equal Opportunity in Admission to Schools. *Journal of Spatial Science*. https://doi.org/10.1080/15582159.2022.2129334

Sabrina, D. C. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *18*(2), 92. https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7829

Safitri, M. A., & Yusran, R. (2021). Evaluasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi pada SMA Negeri di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, *4*(1), 92–100. https://doi.org/10.24036/jce.v4i1.436
Simangunsong, F. (2019). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
William N. Dunn. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (p. 710). UGM Press.